



## Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penanganan Kesehatan Masyarakat

Irman Puansah<sup>1\*</sup>, Anggi Aulia Hutasuhut<sup>2</sup>, Melisa Aulia Koto<sup>3</sup> Nurhamida Fitri Simatupang<sup>4</sup> Muri Entia Melati Lubis<sup>5</sup>

Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan, Padangsidimpuan, Sumatera Utara, Indonesia.

\*Penulis Korespondensi: [Irman.puansah@um-tapsel.ac.id](mailto:Irman.puansah@um-tapsel.ac.id)

**Abstract.** *Public health is an important indicator of the success of regional development and the quality of public services. Local governments play a strategic role in the provision of healthcare services through adaptive, effective, and community-oriented policies. This study aims to analyze local government policies in addressing public health issues through a literature review approach. The research method employed a literature study by examining scientific journals, laws and regulations, books, and policy documents related to regional health policies in Indonesia. The findings indicate that regional health policies are influenced by decentralization, fiscal capacity, the quality of governance, and inter-institutional synergy. Policy implementation continues to face several challenges, including limited budgets, low quality of healthcare human resources, unequal access to healthcare services, and weak intersectoral coordination. However, public service innovation and the strengthening of good governance have proven effective in improving healthcare service delivery. This study emphasizes that the success of regional health policies is determined by government commitment, community participation, integration between central and local policies, institutional strengthening, budget optimization, and service innovations based on community needs.*

**Keywords:** *Public Policy; Local Government; Public Health; Healthcare Services; Health Governance.*

**Abstrak.** Kesehatan masyarakat merupakan indikator penting keberhasilan pembangunan daerah dan kualitas pelayanan publik. Pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan melalui kebijakan yang adaptif, efektif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis kebijakan pemerintah daerah dalam penanganan kesehatan masyarakat melalui pendekatan kajian pustaka. Metode penelitian menggunakan studi literatur dengan menelaah jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, buku, dan dokumen kebijakan terkait kesehatan daerah di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan kesehatan daerah dipengaruhi oleh desentralisasi, kapasitas fiskal, kualitas tata kelola pemerintahan, serta sinergi antar lembaga. Implementasi kebijakan masih menghadapi kendala berupa keterbatasan anggaran, rendahnya kualitas sumber daya manusia kesehatan, ketimpangan akses pelayanan, dan lemahnya koordinasi antar sektor. Namun, inovasi pelayanan publik dan penguatan *good governance* terbukti mampu meningkatkan efektivitas pelayanan kesehatan. Penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan kesehatan daerah ditentukan oleh komitmen pemerintah, partisipasi masyarakat, integrasi kebijakan pusat dan daerah, penguatan kelembagaan, optimalisasi anggaran, serta inovasi pelayanan berbasis kebutuhan masyarakat.

**Kata Kunci:** Kebijakan Publik; Pemerintah Daerah; Kesehatan Masyarakat; Pelayanan Kesehatan; Tata Kelola Kesehatan.

## **1. LATAR BELAKANG**

Kesehatan masyarakat merupakan hak dasar setiap warga negara yang harus dipenuhi oleh pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 H ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Dalam konteks otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan yang besar dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan sebagai bagian dari pelayanan publik yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah).

Desentralisasi sektor kesehatan memberikan peluang kepada pemerintah daerah untuk menyusun kebijakan yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masyarakat lokal. Menurut Rondinelli desentralisasi merupakan upaya distribusi kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah guna meningkatkan efisiensi pelayanan publik dan memperkuat partisipasi masyarakat (Rondinelli, 1981). Dalam bidang kesehatan, desentralisasi diharapkan mampu meningkatkan aksesibilitas, kualitas pelayanan, dan pemerataan kesehatan masyarakat.

Namun dalam implementasinya, kebijakan pemerintah daerah dalam penanganan kesehatan masyarakat masih menghadapi berbagai tantangan. Ketimpangan fasilitas kesehatan antar daerah, keterbatasan anggaran kesehatan, rendahnya kualitas sumber daya manusia kesehatan, serta lemahnya tata kelola pemerintahan menjadi faktor yang memengaruhi efektivitas kebijakan kesehatan daerah (Mills et al., 1990). Selain itu, pandemi COVID-19 menunjukkan bahwa kapasitas pemerintah daerah dalam menangani krisis kesehatan masih sangat beragam.

Menurut *World Health Organization* (WHO, 2020), sistem kesehatan yang kuat memerlukan integrasi kebijakan, kepemimpinan yang efektif, pembiayaan kesehatan yang memadai, dan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah daerah dituntut untuk mampu merumuskan kebijakan kesehatan yang adaptif dan berbasis kebutuhan masyarakat.

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan kesehatan daerah dipengaruhi oleh kualitas tata kelola pemerintahan dan sinergi antar pemangku kepentingan. Dalam beberapa studi ditemukan bahwa koordinasi lintas sektor menjadi faktor penting dalam efektivitas penanganan kesehatan masyarakat (Puansah et al., 2023, 2025; Puansya et al., 2024; Syahrul'an et al., 2025). Sementara itu, pada penelitian lain disebutkan bahwa reformasi birokrasi daerah memiliki hubungan erat dengan kualitas pelayanan kesehatan publik (Nurmandi et al., n.d.).

Penelitian ini penting dilakukan karena kebijakan kesehatan daerah menjadi salah satu instrumen utama dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Melalui pendekatan studi pustaka, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pemerintah daerah dalam penanganan kesehatan masyarakat, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi implementasinya, serta memberikan rekomendasi kebijakan yang relevan bagi peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat di Indonesia.

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka (*literature review*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Kajian pustaka dilakukan melalui penelusuran berbagai sumber ilmiah seperti jurnal nasional dan internasional, buku, peraturan perundang-undangan, dokumen kebijakan pemerintah, serta laporan lembaga kesehatan yang relevan dengan kebijakan pemerintah daerah dalam penanganan kesehatan masyarakat (Puansah, 2024, 2025b, 2025a; Puansah, Pulungan, et al., 2024; Puansah, Sukmana, et al., 2024; Puansah & Parapat, n.d.).

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengidentifikasi, mengkaji, dan menganalisis berbagai literatur yang memiliki keterkaitan dengan tema penelitian. Literatur yang digunakan berasal dari artikel ilmiah terindeks SINTA, Google Scholar, Scopus, dan regulasi pemerintah yang diterbitkan.

Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*), yaitu dengan mengelompokkan informasi berdasarkan tema-tema tertentu seperti implementasi kebijakan kesehatan, tata kelola pemerintahan daerah, pelayanan kesehatan publik, dan faktor-faktor penghambat serta pendukung kebijakan kesehatan daerah. Selanjutnya, data dianalisis secara sistematis untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai kebijakan pemerintah daerah dalam penanganan kesehatan masyarakat.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penanganan Kesehatan Masyarakat**

Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan sebagai bagian dari urusan wajib pelayanan dasar. Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dijelaskan bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab terhadap perencanaan, pengaturan, penyelenggaraan, pembinaan, dan pengawasan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat.

Kebijakan kesehatan daerah pada umumnya diwujudkan melalui program pelayanan kesehatan dasar, penguatan fasilitas kesehatan, peningkatan kualitas tenaga kesehatan, serta penyediaan jaminan kesehatan masyarakat daerah. Menurut Nugroho kebijakan publik merupakan keputusan strategis yang dibuat pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan publik melalui tindakan yang terencana dan terukur (Nugroho, 2020).

Dalam konteks kesehatan masyarakat, pemerintah daerah dituntut mampu menghadirkan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Kebijakan tersebut meliputi penguatan puskesmas, penyediaan rumah sakit daerah, penanggulangan penyakit menular, peningkatan gizi masyarakat, serta pelayanan kesehatan ibu dan anak.

## **Desentralisasi dan Tata Kelola Kesehatan Daerah**

Penerapan desentralisasi memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan sektor kesehatan. Menurut Cheema dan Rondinelli desentralisasi bertujuan meningkatkan efisiensi pelayanan publik melalui penguatan kewenangan lokal (Cheema & Rondinelli, 2007).

Namun demikian, implementasi desentralisasi kesehatan di Indonesia belum sepenuhnya berjalan optimal. Beberapa daerah memiliki kapasitas fiskal dan sumber daya yang terbatas sehingga memengaruhi kualitas pelayanan kesehatan masyarakat. Ketimpangan pembangunan kesehatan antar daerah masih menjadi persoalan serius, terutama di wilayah terpencil dan perbatasan.

Konsep *good governance* menjadi faktor penting dalam tata kelola kesehatan daerah. Menurut UNDP *good governance* ditandai oleh partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan supremasi hukum (Qudrat-I Elahi, 2009). Dalam pelayanan kesehatan, prinsip *good governance* diperlukan untuk memastikan bahwa kebijakan kesehatan dapat berjalan secara efektif dan tepat sasaran.

Pemerintah daerah yang mampu menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik cenderung memiliki kualitas pelayanan kesehatan yang lebih baik. Hal ini terlihat pada beberapa daerah yang berhasil menghadirkan inovasi pelayanan kesehatan berbasis digital dan pelayanan kesehatan terpadu.

### **Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Kesehatan Daerah**

Implementasi kebijakan kesehatan daerah menghadapi berbagai kendala, baik struktural maupun administratif. Salah satu faktor utama adalah keterbatasan anggaran kesehatan daerah. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (2023), masih terdapat daerah yang belum memenuhi alokasi minimal anggaran kesehatan sebesar 10% dari APBD di luar gaji.

Selain itu, distribusi tenaga kesehatan yang tidak merata menjadi hambatan serius dalam pelayanan kesehatan masyarakat (Elungan et al., 2025). Banyak daerah terpencil

mengalami kekurangan dokter, tenaga medis, dan fasilitas kesehatan yang memadai. Kondisi ini berdampak pada rendahnya kualitas pelayanan kesehatan masyarakat (Anisa, 2026).

Koordinasi antar lembaga juga menjadi tantangan dalam implementasi kebijakan kesehatan daerah. Penanganan kesehatan masyarakat membutuhkan sinergi antara pemerintah daerah, dinas kesehatan, rumah sakit, puskesmas, dan masyarakat. Lemahnya koordinasi dapat menyebabkan kebijakan tidak berjalan efektif (Widjaja & Dhanudibroto, 2025).

Pandemi COVID-19 memperlihatkan bahwa kapasitas pemerintah daerah dalam menghadapi krisis kesehatan masih memerlukan penguatan, terutama dalam aspek manajemen kesehatan, penyediaan fasilitas medis, dan sistem informasi kesehatan.

### **Inovasi Kebijakan Kesehatan Daerah**

Beberapa pemerintah daerah di Indonesia telah berhasil menghadirkan inovasi kebijakan kesehatan yang efektif. Inovasi tersebut meliputi pelayanan kesehatan berbasis digital, sistem rujukan online, pelayanan kesehatan keliling, serta integrasi data kesehatan masyarakat.

Inovasi pelayanan kesehatan berbasis teknologi informasi mampu meningkatkan efisiensi pelayanan publik dan memperluas akses masyarakat terhadap layanan kesehatan. Menurut Dwiyanto inovasi birokrasi merupakan salah satu strategi penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik (Dwiyanto, 2018).

Selain itu, partisipasi masyarakat juga menjadi elemen penting dalam keberhasilan kebijakan kesehatan daerah. Keterlibatan masyarakat dalam program kesehatan mampu meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan serta memperkuat pengawasan sosial terhadap pelayanan kesehatan.

## **4. SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Kebijakan pemerintah daerah dalam penanganan kesehatan masyarakat memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

Melalui desentralisasi, pemerintah daerah memperoleh kewenangan yang luas untuk merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan kesehatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal.

Hasil kajian menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan kesehatan daerah dipengaruhi oleh kualitas tata kelola pemerintahan, kapasitas fiskal daerah, ketersediaan sumber daya manusia kesehatan, serta koordinasi antar lembaga. Implementasi kebijakan kesehatan daerah masih menghadapi berbagai kendala seperti keterbatasan anggaran, ketimpangan fasilitas kesehatan, dan rendahnya kualitas pelayanan di beberapa daerah.

Namun demikian, inovasi kebijakan berbasis teknologi informasi dan penguatan prinsip *good governance* mampu meningkatkan efektivitas pelayanan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu terus memperkuat kapasitas kelembagaan, meningkatkan alokasi anggaran kesehatan, serta mengembangkan inovasi pelayanan kesehatan berbasis kebutuhan masyarakat.

### **Saran**

- a. Pemerintah daerah perlu meningkatkan alokasi anggaran kesehatan secara optimal untuk mendukung pemerataan pelayanan kesehatan masyarakat.
- b. Diperlukan penguatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan melalui pendidikan, pelatihan, dan distribusi tenaga kesehatan yang merata.
- c. Pemerintah daerah perlu mengembangkan inovasi pelayanan kesehatan berbasis digital guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik.
- d. Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat perlu diperkuat agar implementasi kebijakan kesehatan dapat berjalan secara optimal.

## DAFTAR REFERENSI

- Anisa, N. (2026). Analisis Sistem Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Dinas Kesehatan Kabupaten Lahat. In *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora (Isora)* (Vol. 4). <https://isora.safar.id/index.php/isora>
- Cheema, G. S., & Rondinelli, D. A. (2007). *Decentralizing governance: Emerging concepts and practices*.
- Dwiyanto, A. (2018). *Manajemen pelayanan publik: peduli inklusif dan kolaborasi*. UGM press.
- Elungan, A. N. F., Baharuddin, M., & Tjenreng, Z. (2025). Government Policy in Health Services: Kebijakan Pemerintah dalam Pelayanan Kesehatan. In *SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION: Economic, Accounting, Management and Business* (Vol. 8, Number 1).
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2023). *Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2023*. Jakarta: Kemenkes RI.
- Mills, A., Vaughnan, J. P., Smith, D. L., & Tabibzadeh, I. (1990). *HEALTH SYSTEM DECENTRALIZATION concepts, issues and country experience*.
- Nugroho, R. (2020). *Public Policy 6-Edisi Revisi*. Elex Media Komputindo.
- Nurmandi, A., Lutfi, M., & Qodir, Z. (n.d.). *Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pendekatan Model Demokrasi pada Era Otonomi Daerah*. <https://doi.org/10.47030/jgi.v1i1.53>
- Puansah, I. (2024). *Studi Literatur : Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia*. 8, 778–787.
- Puansah, I. (2025a). Bibliometric Analysis of Public Service Digitalization in Villages: Mapping Trends and Collaboration Networks. *Khazanah Sosial*, 7, 1018–1030. <https://doi.org/10.15575/ks.v7i3.49014>
- Puansah, I. (2025b). *Praktik Nepotisme pada Pemerintahan Desa*.
- Puansah, I., & Parapat, N. (n.d.). *Kampanye Hitam Pada Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia*. 8(1), 1396–1406.
- Puansah, I., Pulungan, D. S., Nurpaisah, Y., Wahyuni, D., Gultom, A. W., & Ramadhani, L. (2023). *Kebijakan Pemerintah Desa Terhadap Pencegahan Stunting Di Desa Pagaran Gala-Gala Kecamatan Panyabungan Selatan*. 7, 532–537.
- Puansah, I., Pulungan, D. S., & Sahbana, A. (2024). Politik Identitas Pada Pemilihan Kepala Desa. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah : Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Humaniora*, 8(1), 340. <https://doi.org/10.31604/jim.v8i1.2024.340-348>

- Puansah, I., Sukmana, O., & Soedarwo, V. S. D. (2024). *Political Dynasties in Village Government and Their Impact on Society and Development*. 5(2), 119–136.
- Puansah, I., Syah Pulungan, D., Haris, R., Harahap, S., Baroroh, R., Tapanuli, U. M., & Alamat, S. (2025). *ENHANCING THE ROLE OF THE RUMAH DESA SEHAT AS A CONVERGENCE CENTER FOR ACCELERATING STUNTING MITIGATION IN MANDAILING NATAL REGENCY*.
- Puansya, I., Pulungan, D. S., & Harahap, R. H. (2024). *Local Government Policy on Handling Stunting in Mandailing Natal Regency*. 4(001), 408–415.
- Qudrat-I Elahi, K. (2009). UNDP on good governance. *International Journal of Social Economics*, 36(12), 1167–1180.
- Rondinelli, Dennis A. (1981). Government Decentralization in Comparative Perspective: Theory and Practice in Developing Countries. *International Review of Administrative Sciences*, 47(2), 133–145.  
<https://doi.org/10.1177/002085238004700205>
- Syahrul'an, Susilawati, E., & Meiwan K, K. T. (2025). FAKTOR DETERMINAN KEBERHASILAN ADMINISTRASI KEBIJAKAN SANITASI LINGKUNGAN KESEHATAN MASYARAKAT DI KOTA MEDAN. *Journal of Healthcare Technology and Medicine*, 11. [file:///C:/Users/ipuan/Downloads/5641-10615-1-PB%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/ipuan/Downloads/5641-10615-1-PB%20(1).pdf)
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- Widjaja, G., & Dhanudibroto, H. (2025). INTER-GOVERNMENTAL COORDINATION AND THE EFFECTIVENESS OF WELFARE POLICIES. *SIBATIK JOURNAL | VOLUME*, 4(7). <https://doi.org/10.54443/sibatik.v4i7.2945>
- World Health Organization. (2020). *Strengthening the Health System Response to COVID-19*. Geneva: WHO.